



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 61
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN
SETIAP DESA DAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan rumusan alokasi Dana Desa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK/07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa

- Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
 14. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 20);
 15. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN SETIAP DESA DAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 4);

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA Pasal 4

- (1) Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

DD Kab = Ad Kab + AA Kab + AF Kab

Keterangan:

DD Kab = Dana Desa setiap Kabupaten

AD Kab = Alokasi Dasar setiap kabupaten

AA Kab = Alokasi Afirmasi setiap kabupaten

AF Kab = Alokasi Formula setiap kabupaten

- (2) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa.
- (3) Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (5) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Kementerian Sosial.
- (6) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke- 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (8) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masing-masing ditujukan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK kabupaten.
- (9) Besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$AA \text{ Desa} = (0,03 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$	
Keterangan:	
AA Desa	Alokasi Afirmasi setiap Desa
DD	pagu Dana Desa nasional
DST	jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin paling tinggi
DT	jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (10) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Kab} = \{(0,10 * Y1 + (0,50 * Y2) + (0,15 * Y3) + (0,25 * Y4)\} * (0,20 * DD)$$

Keterangan:

AF Kab	=	Alokasi Formula kabupaten
Y1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan
Y2	=	rasio jumlah penduduk miskin Desa kabupaten terhadap total penduduk miskin desa nasional
Y3	=	rasio luas wilayah Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten terhadap total luas wilayah Desa nasional
Y4	=	rasio IKK Desa terhadap total Desa IKK kabupaten yang bersangkutan

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati;
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *sifwere*.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan tembusan Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi

- penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Dana Desa diterima di RKUD.
 - (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Februari tahun anggaran berjalan.
 - (5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan.
 - (6) Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala KPPN dapat meminta Bupati untuk melakukan percepatan penyampaian perbaikan laporan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
4. Pasal 14 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Evaluasi terhadap laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan dan capaian *output* Dana Desa.
 - (2) Dalam hal realisasi penyaluran Dana Desa kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) serta capaian *output* kurang dari 50% (lima puluh persen) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Bupati.
6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa;
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Kepala Desa tidak menyampaikan surat permohonan pengajuan pencairan Dana Desa beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a angka 2.
- a. Kepala Desa tidak menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dan konsolidasi Dana Desa.
 - b. penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya;
 - c. dalam hal sisa dana di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan;
 - d. dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

7. Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 28 September 2018

BUPATI BATANG.

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 28 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN,
PENETAPAN RINCIAN SETIAP DESA DAN PENYALURAN DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DANA DESA UNTUK DESA SE KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	PAGU PER DESA	TAHAP I 20%	TAHAP II 40%	TAHAP III 40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	KEC. WONOTUNGGAL							
1	SILURAH	616,345,000	332,474,000.95	157,549,000	1,106,369,000	221,273,800	442,547,600	442,547,600
2	SODONG	616,345,000	56,978,000.12		673,323,000	134,664,600	269,329,200	269,329,200
3	GRINGINGSARI	616,345,000	57,416,036.04		673,761,000	134,752,200	269,504,400	269,504,400
4	KEDUNGMALANG	616,345,000	99,937,000.68		716,283,000	143,256,600	286,513,200	286,513,200
5	SENDANG	616,345,000	45,007,000.92		661,353,000	132,270,600	264,541,200	264,541,200
6	WONOTUNGGAL	616,345,000	67,752,000.41		684,097,000	136,819,400	273,638,800	273,638,800
7	BROKOH	616,345,000	38,220,000.01		654,565,000	130,913,000	261,826,000	261,826,000
8	WATES	616,345,000	41,009,000.34		657,354,000	131,470,800	262,941,600	262,941,600
9	BRAYO	616,345,000	38,401,000.92		654,747,000	130,949,400	261,898,800	261,898,800
10	KEMLIGI	616,345,000	28,864,000.09		645,209,000	129,041,800	258,083,600	258,083,600
11	SIGAYAM	616,345,000	38,834,000.78		655,180,000	131,036,000	262,072,000	262,072,000
12	KREYO	616,345,000	44,815,000.81		661,161,000	132,232,200	264,464,400	264,464,400
13	SIWATU	616,345,000	50,577,000.13		666,922,000	133,384,400	266,768,800	266,768,800
14	DRINGO	616,345,000	50,502,000.96		666,848,000	133,369,600	266,739,200	266,739,200
15	PENANGKAN	616,345,000	44,683,000.98		661,029,000	132,205,800	264,411,600	264,411,600
	TOTAL	9,245,175,000			10,438,201,000	2,087,640,200	4,175,280,400	4,175,280,400
II	KEC. BANDAR							
1	TOMBO	616,345,000	214,644,000.87	157,549,000	988,539,000	197,707,800	395,415,600	395,415,600
2	WONOMERTO	616,345,000	99,327,000.19		715,672,000	143,134,400	286,268,800	286,268,800
3	WONODADI	616,345,000	87,851,000.73		704,197,000	140,839,400	281,678,800	281,678,800
4	PESALAKAN	616,345,000	79,941,000.04		696,286,000	139,257,200	278,514,400	278,514,400
5	BINANGUN	616,345,000	159,755,000.37		776,100,000	155,220,000	310,440,000	310,440,000
6	SIDAYU	616,345,000	83,674,000.55		700,020,000	140,004,000	280,008,000	280,008,000
7	TOSO	616,345,000	182,030,000.27	157,549,000	955,924,000	191,184,800	382,369,600	382,369,600

8	KLUWIH	616,345,000	309,073,000.26			925,418,000	185,083,600	370,167,200	370,167,200
9	WONOKERTO	616,345,000	95,731,000.98			712,077,000	142,415,400	284,830,800	284,830,800
10	BANDAR	616,345,000	29,705,000.91			646,051,000	129,210,200	258,420,400	258,420,400
11	TUMBEREP	616,345,000	202,093,000.27			818,438,000	163,687,600	327,375,200	327,375,200
12	TAMBAHREJO	616,345,000	154,348,000.48			770,693,000	154,138,600	308,277,200	308,277,200
13	PUNCAANGGADING	616,345,000	67,161,000.07			683,506,000	136,701,200	273,402,400	273,402,400
14	CANDI	616,345,000	163,971,000.58		157,549,000	937,866,000	187,573,200	375,146,400	375,146,400
15	WONOSEGORO	616,345,000	47,840,000.14			664,185,000	132,837,000	265,674,000	265,674,000
16	SIMPAR	616,345,000	46,631,000.31			662,976,000	132,595,200	265,190,400	265,190,400
17	BATOMBO	616,345,000	58,819,000.08			675,164,000	135,032,800	270,065,600	270,065,600
	TOTAL	10,477,865,000				13,033,112,000	2,606,622,400	5,213,244,800	5,213,244,800
III									
KEC. BLADO									
1	GERLANG	616,345,000	170,476,000.38			786,821,000	157,364,200	314,728,400	314,728,400
2	KALTENGAH	616,345,000	67,519,000.36			683,864,000	136,772,800	273,545,600	273,545,600
3	KEMBANGLANGIT	616,345,000	78,840,000.67			695,186,000	139,037,200	278,074,400	278,074,400
4	GONDANG	616,345,000	83,105,000.19			699,450,000	139,890,000	279,780,000	279,780,000
5	BISMO	616,345,000	59,582,000.04			675,927,000	135,185,400	270,370,800	270,370,800
6	KETELENG	616,345,000	95,419,000.05			711,764,000	142,352,800	284,705,600	284,705,600
7	KALISARI	616,345,000	63,072,000.57			679,418,000	135,883,600	271,767,200	271,767,200
8	BESANI	616,345,000	204,006,000.85		157,549,000	977,901,000	195,580,200	391,160,400	391,160,400
9	WONOBODRO	616,345,000	187,802,000.49		157,549,000	961,696,000	192,339,200	384,678,400	384,678,400
10	BAWANG	616,345,000	66,755,000.65			683,101,000	136,620,200	273,240,400	273,240,400
11	PESANTREN	616,345,000	142,756,000.38		157,549,000	916,650,000	183,330,000	366,660,000	366,660,000
12	KAMBANGAN	616,345,000	109,765,000.49			726,110,000	145,222,000	290,444,000	290,444,000
13	KEPUTON	616,345,000	102,366,000.94			718,712,000	143,742,400	287,484,800	287,484,800
14	BLADO	616,345,000	79,652,000.14			695,997,000	139,199,400	278,398,800	278,398,800
15	COKRO	616,345,000	74,098,000.40			690,441,000	138,088,200	276,176,400	276,176,400
16	SELOPAJANG BARAT	616,345,000	86,191,000.84			702,537,000	140,507,400	281,014,800	281,014,800
17	KALIPANCUR	616,345,000	76,602,000.10			692,947,000	138,589,400	277,178,800	277,178,800
18	SELOPAJANG TIMUR	616,345,000	76,653,000.70			692,999,000	138,599,800	277,199,600	277,199,600
	TOTAL	11,094,210,000				13,391,521,000	2,678,304,200	5,356,608,400	5,356,608,400
IV									
KEC. REBAN									
1	PACET	616,345,000	276,023,000.52		157,549,000	1,049,918,000	209,983,600	419,967,200	419,967,200
2	MOJOTENGAH	616,345,000	261,505,000.27			877,850,000	175,570,000	351,140,000	351,140,000
3	CABLIKAN	616,345,000	128,702,000.39		157,549,000	902,596,000	180,519,200	361,038,400	361,038,400
4	NGROTO	616,345,000	210,061,000.22		157,549,000	983,955,000	196,791,000	393,582,000	393,582,000
5	NGADIREJO	616,345,000	128,642,000.48			744,987,000	148,997,400	297,994,800	297,994,800
6	REBAN	616,345,000	81,153,000.93			697,499,000	139,499,800	278,999,600	278,999,600
7	TAMBAKBOYO	616,345,000	210,522,000.02		157,549,000	984,416,000	196,883,200	393,766,400	393,766,400
8	ADINUSO	616,345,000	130,088,000.44			746,433,000	149,286,600	298,573,200	298,573,200

9	KUMESU	616,345,000	98,256,000.46		714,601,000	142,920,200	285,840,400	285,840,400
10	KEPUNDUNG	616,345,000	82,196,000.35		698,541,000	139,708,200	279,416,400	279,416,400
11	PADOMASAN	616,345,000	67,156,000.42		683,501,000	136,700,200	273,400,400	273,400,400
12	SEMAMPUR	616,345,000	81,485,000.52		697,831,000	139,566,200	279,132,400	279,132,400
13	WONOSOBO	616,345,000	125,706,000.18		742,051,000	148,410,200	296,820,400	296,820,400
14	SOJOMERTO	616,345,000	77,657,000.83		694,003,000	138,800,600	277,601,200	277,601,200
15	KARANGANYAR	616,345,000	75,517,000.66		691,863,000	138,372,600	276,745,200	276,745,200
16	POLODORO	616,345,000	53,100,000.64		669,446,000	133,889,200	267,778,400	267,778,400
17	KALISARI	616,345,000	45,676,000.50		662,021,000	132,404,200	264,808,400	264,808,400
18	SOKOMANGLI	616,345,000	51,109,000.42		667,454,000	133,490,800	266,981,600	266,981,600
19	WONOROJO	616,345,000	64,123,000.54		680,469,000	136,093,800	272,187,600	272,187,600
	TOTAL	11,710,555,000			14,589,435,000	2,917,887,000	5,835,774,000	5,835,774,000
V	KEC. BAWANG							
1	PRANTEN	616,345,000	84,040,000.37		700,385,000	140,077,000	208,154,000	280,154,000
2	DELES	616,345,000	188,154,000.25	157,549,000	962,048,000	192,409,600	384,819,200	384,819,200
3	GUNUNGSARI	616,345,000	116,082,000.95		732,428,000	146,485,600	292,971,200	292,971,200
4	JAMBANGAN	616,345,000	210,982,000.15		827,327,000	165,465,400	330,930,800	330,930,800
5	KEBATURAN	616,345,000	109,880,000.73		726,226,000	145,245,200	290,490,400	290,490,400
6	KALIREJO	616,345,000	162,287,000.98		778,633,000	155,726,600	311,453,200	311,453,200
7	SANGUBANYU	616,345,000	81,823,000.94		698,169,000	139,633,800	279,267,600	279,267,600
8	WONOSARI	616,345,000	100,355,000.63		716,701,000	143,340,200	286,580,400	286,580,400
9	JAMPURANG	616,345,000	50,112,000.40		666,457,000	133,291,400	266,582,800	266,582,800
10	BAWANG	616,345,000	56,815,000.08		673,160,000	134,632,000	269,264,000	269,264,000
11	CANDIGURUR	616,345,000	88,417,000.79		702,763,000	140,552,600	281,105,200	281,105,200
12	PANGEMPON	616,345,000	50,593,000.28		666,938,000	133,387,600	266,775,200	266,775,200
13	SIDOHARJO	616,345,000	235,889,000.04	157,549,000	1,009,783,000	201,956,600	403,913,200	403,913,200
14	SURJO	616,345,000	171,773,000.57		788,119,000	157,623,800	315,247,600	315,247,600
15	SOKA	616,345,000	49,377,000.01		665,722,000	133,144,400	266,288,800	266,288,800
16	SIBEBEK	616,345,000	97,837,000.88		714,183,000	142,836,600	285,673,200	285,673,200
17	GETAS	616,345,000	58,673,000.07		675,018,000	135,003,600	270,007,200	270,007,200
18	PASUSUKAN	616,345,000	54,615,000.09		670,960,000	134,192,000	268,384,000	268,384,000
19	CANDIREJO	616,345,000	102,462,000.79		718,808,000	143,761,600	287,523,200	287,523,200
20	PURBO	616,345,000	80,306,000.35		696,651,000	139,330,200	278,660,400	278,660,400
	TOTAL	12,326,900,000			14,790,479,000	2,958,095,800	5,916,191,600	5,916,191,600
VI	KEC. TERSONO							
1	SENDANG	616,345,000	45,480,000.06		661,825,000	132,365,000	264,730,000	264,730,000
2	BANTENG	616,345,000	66,363,000.48		682,708,000	136,541,600	273,083,200	273,083,200
3	SUMURBANGER	616,345,000	48,662,000.07		665,007,000	133,001,400	266,002,800	266,002,800

4	MARGOSOONO	616,345,000	58,356,000.63		674,702,000	134,940,400	269,880,800	269,880,800
5	SIDALANG	616,345,000	47,633,000.58		663,979,000	132,795,800	265,591,600	265,591,600
6	POSOWANGI	616,345,000	51,817,000.41		668,162,000	133,632,400	267,264,800	267,264,800
7	WANAR	616,345,000	53,243,000.99		669,589,000	133,917,800	267,835,600	267,835,600
8	GONDO	616,345,000	61,536,000.59		677,882,000	135,576,400	271,152,800	271,152,800
9	REJOSARI BARAT	616,345,000	33,922,000.32		650,267,000	130,053,400	260,106,800	260,106,800
10	BOJA	616,345,000	61,456,000.89		677,802,000	135,560,400	271,120,800	271,120,800
11	PUJUT	616,345,000	46,573,000.86		662,919,000	132,583,800	265,167,600	265,167,600
12	TERSONO	616,345,000	29,504,000.49		645,849,000	129,169,800	258,339,600	258,339,600
13	TANJUNGSARI	616,345,000	32,744,000.78		649,090,000	129,818,000	259,636,000	259,636,000
14	KEBUMEN	616,345,000	47,056,000.36		663,401,000	132,680,200	265,360,400	265,360,400
15	HARJOWINANGUN BARAT	616,345,000	26,325,000.93		642,671,000	128,534,200	257,068,400	257,068,400
16	TEGALOMBO	616,345,000	45,543,000.28		661,888,000	132,377,600	264,755,200	264,755,200
17	KRANGGAN	616,345,000	51,139,000.47		667,484,000	133,496,800	266,993,600	266,993,600
18	SATRIYAN	616,345,000	37,494,000.97		653,840,000	130,768,000	261,536,000	261,536,000
19	HARJOWINANGUN TIMUR	616,345,000	40,838,000.26		657,183,000	131,436,600	262,873,200	262,873,200
20	REJOSARI TIMUR	616,345,000	44,479,000.85		660,825,000	132,165,000	264,330,000	264,330,000
	TOTAL	12,326,900,000			13,257,073,000	2,651,414,600	5,302,829,200	5,302,829,200
VIII	KEC. GRINGSING							
1	SURODADI	616,345,000	34,424,000.09		650,769,000	130,153,800	260,307,600	260,307,600
2	SENTUL	616,345,000	49,405,000.94		665,751,000	133,150,200	266,300,400	266,300,400
3	PLELEN	616,345,000	48,109,000.27		664,454,000	132,890,800	265,781,600	265,781,600
4	KUTOSARI	616,345,000	51,836,000.31		668,181,000	133,636,200	267,272,400	267,272,400
5	MENTOSARI	616,345,000	64,527,000.63		680,873,000	136,174,600	273,349,200	272,349,200
6	GRINGSING	616,345,000	31,388,000.64		647,734,000	129,546,800	259,093,600	259,093,600
7	YOSOREJO	616,345,000	67,818,000.58		684,164,000	136,832,800	273,665,600	273,665,600
8	KRENGSENG	616,345,000	61,803,000.48		678,148,000	135,629,600	271,259,200	271,259,200
9	SAWANGAN	616,345,000	117,046,000.30		733,391,000	146,678,200	293,356,400	293,356,400
10	KETANGGAN	616,345,000	80,730,000.62		697,076,000	139,415,200	278,830,400	278,830,400
11	LEBO	616,345,000	51,733,000.70		668,079,000	133,615,800	267,231,600	267,231,600
12	KEBONDALEM	616,345,000	53,765,000.96		670,111,000	134,022,200	268,044,400	268,044,400
13	SIDOREJO	616,345,000	49,284,000.07		665,629,000	133,125,800	266,251,600	266,251,600
14	TEDUNAN	616,345,000	57,813,000.29		674,158,000	134,831,600	269,663,200	269,663,200
15	MADUGWONGJATI	616,345,000	70,908,000.77		687,254,000	137,450,800	274,901,600	274,901,600
	TOTAL	9,245,175,000			10,135,772,000	2,027,154,400	4,055,308,800	4,054,308,800
VIII	KEC. LIMPUNG							
1	NGALIYAN	616,345,000	46,722,000.88		663,068,000	132,613,600	265,227,200	265,227,200
2	SUKOREJO	616,345,000	85,808,000.52		702,154,000	140,430,800	280,861,600	280,861,600

3	TEMBOK	616,345,000	76,818,000.96	693,164,000	138,632,800	277,265,600	277,265,600
4	DONOREJO	616,345,000	43,163,000.10	659,508,000	131,901,600	263,803,200	263,803,200
5	SIDOMUJO	616,345,000	51,136,000.37	667,481,000	133,496,200	266,992,400	266,992,400
6	KALISALAK	616,345,000	64,228,000.72	680,574,000	136,114,800	272,229,600	272,229,600
7	LIMPUNG	616,345,000	43,649,000.36	659,994,000	131,998,800	263,997,600	263,997,600
8	KEPUH	616,345,000	38,562,000.79	654,908,000	130,981,600	261,963,200	261,963,200
9	SEMPU	616,345,000	33,208,000.64	649,554,000	129,910,800	259,821,600	259,821,600
10	BABADAN	616,345,000	38,323,000.21	654,668,000	130,933,600	261,867,200	261,867,200
11	PLUMBON	616,345,000	30,564,000.57	646,910,000	129,382,000	258,764,000	258,764,000
12	AMONGROGO	616,345,000	43,158,000.73	659,504,000	131,900,800	263,801,600	263,801,600
13	DISEN	616,345,000	63,738,000.41	680,083,000	136,016,600	272,033,200	272,033,200
14	ROWOSARI	616,345,000	55,762,000.67	672,108,000	134,421,600	268,843,200	268,843,200
15	PUNGGANGAN	616,345,000	44,016,000.40	660,361,000	132,072,200	264,144,400	264,144,400
16	LOBANG	616,345,000	59,921,000.67	676,267,000	135,253,400	270,506,800	270,506,800
17	WONOKERSO	616,345,000	58,643,000.58	674,989,000	134,997,800	269,995,600	269,995,600
	TOTAL	10,477,865,000		11,355,295,000	2,271,059,000	4,542,118,000	4,542,118,000
IX	KEC. BANYUPUTIH						
1	BANYUPUTIH	616,345,000	59,068,000.73	675,414,000	135,082,800	270,165,600	270,165,600
2	KALIBALIK	616,345,000	55,687,000.20	672,032,000	134,406,400	268,812,800	268,812,800
3	SEMBUNG	616,345,000	65,299,000.48	681,644,000	136,328,800	272,657,600	272,657,600
4	KEDAWUNG	616,345,000	91,000.09	707,431,000	141,486,200	282,972,400	282,972,400
5	DILMAS	616,345,000	37,451,000.93	653,797,000	130,179,400	261,518,800	261,518,800
6	LUWUNG	616,345,000	54,585,000.65	670,931,000	134,186,200	268,372,400	268,372,400
7	PENUNDAN	616,345,000	34,592,000.65	650,938,000	130,187,600	260,375,200	260,375,200
8	BANARAN	616,345,000	40,486,000.50	656,831,000	131,366,200	262,732,400	262,732,400
9	TIMBANANG	616,345,000	39,554,000.90	655,900,000	131,180,000	262,360,000	262,360,000
10	BUJU	616,345,000	49,526,000.29	665,871,000	133,174,200	266,348,400	266,348,400
11	KALANGSONO	616,345,000	43,935,000.61	660,281,000	132,056,200	264,112,400	264,112,400
	TOTAL	6,779,795,000		7,351,070,000	1,470,214,000	2,940,428,000	2,940,428,000
X	KEC. SUBAH						
1	MENJANGAN	616,345,000	77,254,000.86	693,600,000	138,720,000	277,440,000	277,440,000
2	KARANGTENGAH	616,345,000	95,752,000.05	712,097,000	142,419,400	284,838,800	284,838,800
3	MANGUNHARJO	616,345,000	47,239,000.04	663,584,000	132,716,800	265,433,600	265,433,600
4	TENGGULANGHARJO	616,345,000	43,928,000.40	660,273,000	132,054,600	264,109,200	264,109,200
5	KALIMANGGIS	616,345,000	112,300,000.03	728,645,000	145,729,000	291,458,000	291,458,000
6	KEBORANGAN	616,345,000	34,713,000.87	651,059,000	130,211,800	260,423,600	260,423,600
7	JATISARI	616,345,000	64,358,000.58	680,704,000	136,140,800	272,281,600	272,281,600
8	SUBAH	616,345,000	37,756,000.14	654,101,000	130,820,200	261,640,400	261,640,400
9	KUMELING	616,345,000	32,774,000.86	649,120,000	129,824,000	259,648,000	259,648,000
10	DURENOMBO	616,345,000	77,139,000.63	693,485,000	138,697,000	277,394,000	277,394,000

11	CIAPAR	616,345,000	29,215,000.28			645,560,000	129,112,000	258,224,000	258,224,000
12	ADINUSO	616,345,000	71,231,000.69			687,577,000	137,515,400	275,030,800	275,030,800
13	SENGON	616,345,000	76,850,000.40			693,195,000	138,639,000	277,278,000	277,278,000
14	GONDANG	616,345,000	106,110,000.01			722,455,000	144,491,000	288,982,000	288,982,000
15	KURIPAN	616,345,000	85,197,000.32			701,542,000	140,308,400	280,616,800	280,616,800
16	KEMIRI BARAT	616,345,000	69,470,000.58			685,816,000	137,163,200	274,326,400	274,326,400
17	KEMIRI TIMUR	616,345,000	102,915,000.18			719,260,000	143,852,000	287,704,000	287,704,000
	TOTAL	10,477,865,000				11,642,073,000	2,328,414,600	4,656,829,200	4,656,829,200
XI	KEC. PEICALUNGAN								
1	PECALUNGAN	616,345,000	44,924,000.47			661,269,000	132,253,800	264,507,600	264,507,600
2	BANDUNG	616,345,000	93,733,000.33			710,078,000	142,015,600	284,031,200	284,031,200
3	GOMBONG	616,345,000	96,229,000.36			712,574,000	142,514,800	285,029,600	285,029,600
4	RANDU	616,345,000	72,994,000.72			689,340,000	137,868,000	275,736,000	275,736,000
5	SIGUCI	616,345,000	62,043,000.57			678,389,000	135,677,800	271,355,600	271,355,600
6	PRETEK	616,345,000	247,088,000.83			1,020,983,000	204,196,600	408,393,200	408,393,200
7	SELOKARTO	616,345,000	144,479,000.25			760,824,000	152,164,800	304,329,600	304,329,600
8	GEMUH	616,345,000	166,332,000.34			940,226,000	188,045,200	376,090,400	376,090,400
9	GUMAWANG	616,345,000	100,960,000.61			717,306,000	143,461,200	286,922,400	286,922,400
10	KENTEN	616,345,000	46,991,000.87			663,337,000	132,667,400	265,334,800	265,334,800
	TOTAL	6,163,450,000				7,554,326,000	1,510,865,200	3,021,730,400	3,021,730,400
XII	KEC. TULIS								
1	WRINGINGINTUNG	616,345,000	103,278,000.52			719,624,000	143,924,800	287,849,600	287,849,600
2	SEMBOJO	616,345,000	34,477,000.68			650,823,000	130,164,600	260,329,200	260,329,200
3	POSONG	616,345,000	38,619,000.35			654,964,000	130,992,800	261,985,600	261,985,600
4	KALIBOYO	616,345,000	111,700,000.00			639,057,000	127,811,400	255,622,800	255,622,800
5	SIMBANGDESA	616,345,000	30,983,000.36			647,328,000	129,465,600	258,931,200	258,931,200
6	BEJI	616,345,000	43,983,000.96			660,329,000	132,065,800	264,131,600	264,131,600
7	TULIS	616,345,000	102,594,000.80			718,940,000	143,788,000	287,576,000	287,576,000
8	SIMBANGJATI	616,345,000	41,543,000.34			657,888,000	131,577,600	263,155,200	263,155,200
9	KEDUNGSEGOG	616,345,000	78,571,000.42			694,916,000	138,983,200	277,966,400	277,966,400
10	KENCONOREJO	616,345,000	5,105,700.70			667,403,000	133,480,600	266,961,200	266,961,200
11	PONOWARENG	616,345,000	47,240,000.59			663,586,000	132,717,200	265,434,400	265,434,400
12	SIBERUK	616,345,000	31,784,000.18			648,129,000	129,625,800	259,251,600	259,251,600
13	KEBUMEN	616,345,000	49,557,000.03			665,902,000	133,180,400	266,360,800	266,360,800
14	CLUWUK	616,345,000	34,633,000.82			650,979,000	130,195,800	260,391,600	260,391,600
15	JRAKAHPAYUNG	616,345,000	59,332,000.69			675,678,000	135,135,600	270,271,200	270,271,200
16	JLOSEKTI	616,345,000	52,302,000.25			668,647,000	133,729,400	267,458,800	267,458,800
17	MANGGIS	616,345,000	45,836,000.17			662,181,000	132,436,200	264,872,400	264,872,400
	TOTAL	10,477,865,000				11,346,374,000	2,269,274,800	4,538,549,600	4,538,549,600

11	GAPURO	616,345,000	28,460,000.70		644,806,000	128,961,200	257,922,400	257,922,400
12	KALIBELUK	616,345,000	42,830,000.79		659,176,000	131,835,200	263,670,400	263,670,400
13	SAWAHJOHO	616,345,000	46,775,000.18		663,120,000	132,624,000	265,248,000	265,248,000
14	CANDIARENG	616,345,000	50,593,000.14		666,938,000	133,387,600	266,775,200	266,775,200
15	LEBO	616,345,000	51,098,000.11		667,443,000	133,488,600	266,977,200	266,977,200
16	MENGUNENG	616,345,000	39,420,000.43		655,765,000	131,153,000	262,306,000	262,306,000
17	TERBAN	616,345,000	31,840,000.06		648,185,000	129,637,000	259,274,000	259,274,000
18	SIJONO	616,345,000	60,667,000.93		677,013,000	135,402,600	270,805,200	270,805,200
	<i>TOTAL</i>	<i>11,094,210,000</i>			12,207,158,000	2,441,431,600	4,882,863,200	4,882,863,200
	TOTAL	147,306,455,000	18,687,781,851	2,363,235,000	168,403,538,000	33,680,707,600	67,362,415,200	67,361,415,200

BUPATI BATANG.

ttd

WIHAJI